

## PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP NASIONALISME PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KOTA CIMAH

Lili Halimah  
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan  
lili.halimah@gmail.com

### Abstrak

Permasalahan nasionalisme sejatinya selalu ada selama manusia itu hidup dan nasionalisme harus ditumbuh kembangkan di berbagai kalangan terutama pada generasi muda. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menumbuh kembangkan semangat nasionalisme melalui pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran PKn diharapkan dapat membangun semangat nasionalisme peserta didik melalui *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition*. Nasionalisme peserta didik harus dikembangkan sejalan dengan pengaruh positif dan negatif globalisasi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup peserta didik. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pengaruh Langsung Pembelajaran PKn terhadap Nasionalisme Peserta Didik. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pembelajaran PKn terhadap nasionalisme peserta didik. Rumusan hipotesis penelitian Pembelajaran PKn berpengaruh langsung terhadap nasionalisme peserta didik. Hasil penelitian Pembelajaran PKn mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,697 (73,94%) dengan standar deviasi sebesar 0,947 termasuk pada kategori tinggi. Artinya secara umum pembelajaran PKn pada peserta didik dinilai telah terlaksana dengan baik, walaupun memiliki sebaran yang kurang merata. Nasionalisme Peserta Didik memperoleh rata-rata 3,979 (79,57%) standar deviasi 0,892 prosentasi 79,57 katagori Tinggi. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembelajaran PKn secara langsung berpengaruh positif terhadap nasionalisme peserta didik pada Sekolah Menengah di Kota Cimahi, pengaruh (R-Square) dapat dinyatakan bahwa pembelajaran PKn berpengaruh tinggi terhadap nasionalisme peserta didik.

**Kata Kunci:** Pembelajaran; Pendidikan Kewarganegaraan; Nasionalisme

### Abstract

*The problem of nationalism has always existed as long as human life and nationalism must be developed in various circles, especially in the younger generation. The government has an obligation to foster the spirit of nationalism through education and learning PKn learning is expected to build the spirit of nationalism of students through civic knowledge, civic skills and civic disposition. Nationalism of students must be developed in line with the positive and negative influences of globalization that can affect the mindset and lifestyle of students. For this reason, the authors are interested in researching the Direct Influence of Civics Learning on Student Nationalism. The purpose of the study was to obtain a direct picture of Civics learning towards student nationalism. Research hypothesis formulation PKn learning directly influences the nationalism of students. The results of the PKn Learning study obtained an average score of 3.697 (73.94%) with a standard deviation of 0.947 included in the high category. This means that in general PKn learning in students is considered to have been implemented well, even though it has a less even distribution. Nationalism Students get an average of 3,979 (79.57%) standard deviations of 0.892 percent, 79.57 categories of height. Hypothesis testing shows that Civics learning directly*

*influences the nationalism of students in the Middle School in Cimahi City, the influence (R-Square) can be stated that PKn learning has a high influence on student nationalism.*

**Keywords:** *Learning; Citizenship Education; Nationalism*

## **A. PENDAHULUAN**

Sudah bukan rahasia umum bahwa bangsa Indonesia secara historis merupakan negara yang pernah dijajah oleh Belanda selama tiga setengah abad dan Jepang selama tiga setengah tahun, hal ini menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia berupa gerakan nasionalisme. Kemunculan nasionalisme Indonesia selain dari adanya perlawanan terhadap kolonialisme juga karena adanya solidaritas nasional Indonesia. (Penelitian Mifdal Zusron Alfaqi, 2015 hlm. 111).

Nasionalisme pada prinsipnya mengembangkan kebersamaan yang lahir dan tumbuh dari rasa senasib dan sepenanggungan, dan komitmen bersama sehingga menimbulkan kesadaran. Ernest Renan (Isjwara, 1967, dlm. 126-127) mengemukakan bahwa rasa kesadaran yang kuat yang berlandaskan atas kesadaran akan pengorbanan yang pernah diderita bersama dalam sejarah. Karena sejatinya nasionalisme merupakan perasaan dan kesetiaan tidak memandang asal-usul dari mana seseorang itu berasal (Kohn, 1960, hlm. 11).

Nasionalisme di Indonesia kini diakui sedang mengalami masalah berat dan kian meredup sinarnya (Kumoro, 2006, hlm. 27). Menumbuh kembangkan nasionalisme bukan persoalan yang mudah, karena hal ini harus dibangun dari

idealisme yang melekat pada diri seseorang. Selama orang itu tidak memiliki idealisme sebagai bangsa yang bersatu dalam realitas kebhinekaannya, maka kesadaran akan nasionalisme itu masih perlu terus dibentuk (Kartodirdjo, 1993, hlm. 24).

Tidak dipungkiri bahwa Bung Karno berhasil melahirkan spirit kebangsaan yang melahirkan konsep negara nasionalistik yang berciri pada ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, integralisme NKRI, dan sistem demokrasi dalam kepemimpinan, hingga sekarang. (Penelitian Masroer, 2017, hlm. 233)

Generasi muda sebagai generasi penerus harus memiliki jiwa nasionalisme dan tanggung jawab terhadap negeri ini. Oleh karena itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk menumbuhkan jiwa semangat nasionalisme dan rasa cinta akan tanah air pada generasi bangsa.

Rasa persatuan dan kesatuan generasi muda harus dibina melalui pendidikan, diharapkan dapat menumbuhkan nasionalisme yang tinggi, pada akhirnya akan berjuang pada tingkat kesadaran generasi muda sebagai generasi pembangunan yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah kemajuan seperti yang dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah mempunyai peran

penting dalam menumbuhkan pemahaman dan motivasi agar jiwa nasionalisme generasi muda tumbuh berkembang menjadi satu kesatuan dengan dirinya melalui pendidikan dan pembelajaran.

Menurut Zais (1976 hal. 2460) dalam Elaine B Johnson (2014: 18) Pembelajaran merupakan *a relatively permanent change in response potentiality which occurs as a result of reinforced practice, and a change in human disposition or capability, which can be retained, and which is not simply ascribable to the process of growth.*

Pertama belajar harus menghasilkan perubahan perilaku anak didik yang relatif permanen, artinya peran guru adalah perilaku perubahan (*agen of change*). Karena itu, pembelajaran diartikan sebagai suatu pembekalan yang dapat memberikan hasil jika orang-orang berinteraksi dengan informasi berupa materi, kegiatan, dan pengalaman” (Anggraeni, 2009, hlm. 25).

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diharapkan dapat membangun semangat nasionalisme peserta didik, yakni melalui tiga komponen diantaranya *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition*. Menurut Winataputra (2001, hlm. 317-318) PKn paradigma baru tersebut mengusung tujuan utama yakni mengembangkan kemampuan dasar “*civic competencies*” yakni *civic knowledge* (pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan), *civic*

*disposition* (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan), dan *civic skills* (perangkat keterampilan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan) yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara.

Diharapkan peserta didik mampu merefleksikan ketiga komponen tersebut dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui PKn, peserta didik diharapkan bukan hanya memiliki pengetahuan tentang nasionalisme saja tetapi juga memiliki keterampilan dalam merespon berbagai persoalan multi dimensional yang dapat melemahkan semangat nasionalisme.

Pembelajaran PKn merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik antara pendidik dan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pembelajaran PKn perubahan tingkah laku adalah tercapainya tujuan pembelajaran PKn yakni terbentuknya pribadi warganegara yang cerdas dan baik. Pembelajaran PKn membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi (Winataputra, dkk., 2007, hlm. 33).

Nasionalisme peserta didik harus dikembangkan sejalan dengan pengaruh positif dan negatif globalisasi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup peserta didik yang kian memprihatinkan.

Hal serupa diungkapkan oleh Prabowo (1995) sebagian generasi muda Indonesia saat ini mengalami erosi nasionalisme, hal ini ditandai dengan sikap sebagian generasi muda yang kurang menghayati simbol-simbol kebangsaan, seperti lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih (Hasil Penelitian Anggraeni Kusumawardani dan Faturochman, 2004, hlm. 61).

Pembelajaran PKn diharapkan dapat memfilter fenomena anti nasionalisme yang marak di kalangan generasi muda. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pengaruh Langsung Pembelajaran PKn terhadap Nasionalisme Peserta Didik di Sekolah Menengah Kota Cimahi. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pembelajaran PKn terhadap nasionalisme peserta didik Sekolah Menengah Kota Cimahi.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah teridentifikasi, rumusan hipotesis penelitian Pembelajaran PKn berpengaruh langsung terhadap nasionalisme peserta didik Sekolah Menengah Kota Cimahi.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Masalah nasionalisme selalu muncul dan seringkali mencuat dari kalangan generasi muda, hal ini diperkuat oleh penelitian Supardan (2004) persoalan nasionalisme, selalu muncul di setiap

ranah zaman dan cukup menggelisahkan dan memunculkan wacana di media massa, karena hal itu kerap mencuat secara fenomenal khususnya di kalangan generasi muda. Lunturnya semangat nasionalisme bukan saja membuat semangat hidup, semangat juang, dan semangat membangun negeri ini pudar, bahkan apatis dan dapat mengancam kebersatuan dan/atau disintegrasi bangsa.

Penelitian Komalasari (2007) saat ini disinyalir bahwa nasionalisme bangsa Indonesia rapuh dalam menghadapi kekuatan eksternal. Tertanamnya pandangan global pada setiap individu dapat berdampak pada tercerabutnya nilai lokalitas yang dimilikinya, bahkan individu lebih mengenal budaya-budaya global yang instan dibandingkan dengan budaya-budaya lokal yang memiliki karakter dan sarat dengan makna (Mulyana, 2009).

Penelitian M. HusinAffan<sup>1</sup> dan Hafidh Maksum (2016, hlm. 65-72) Karakteristik masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan sopan santun kini mulai pudar sejak masuknya budaya asing ke Indonesia yang tidak bisa diseleksi dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Maka, dalam hal ini pemerintah memiliki peranan penting untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan Indonesia dalam kehidupan masyarakatnya karena nilai-nilai kebudayaan dari leluhur merupakan filosofi hidup pada tiap daerahnya meskipun tanpa bantuan teknologi.

Hal ini berdampak pada perilaku dan sikap peserta didik dalam merefleksikan pemahaman nasionalisme bagi kehidupannya baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Anak muda sekarang lebih menyukai budaya luar yang dianggap modern dan secara perlahan dapat mempengaruhi pola pikir, sifat dan perilaku mereka baik ke arah positif maupun negatif dari globalisasi yang mengantarkannya melahirkan suatu gaya hidup (*a new life style*). Kenyataan tersebut dapat disebabkan gaya hidup global cepat diserap oleh masyarakat akibat majunya arus informasi yang dihasilkan oleh teknologi (Tilaar, 2002, hlm. 1).

Berdasarkan hasil Penelitian Cornelis Lay, 2006, hlm. 165-180 bahwa *Current issues and challenges have placed nationalism into a difficult position. This leads to the dichotomy of tribalism and globalism or between fragmentation and integration. Artinya* Saat ini isu dan tantangan Nasionalisme telah menempatkan ke posisi sulit dan mengarah kepada dikotomi tribalisme dan globalisasi.

Saat dunia sudah mengalami era globalisasi, kita bisa berhubungan satu dengan yang lain dengan mudah dan sangat menguntungkan. Tetapi dengan adanya globalisasi ini mengakibatkan banyaknya budaya yang masuk dan menyebabkan berbagai masalah di negeri ini, misalnya menurunnya rasa cinta budaya dan nasionalisme generasi muda.

Budaya Indonesia bisa hilang termakan zaman karena orang-orang Indonesia lebih suka meniru kebudayaan luar (Penelitian Dyah Satya Yoga Agustin, 2011, 177)

Hasil penelitian Dalyono (2010) menunjukkan sebagian generasi muda 65,3% menggunakan IT sebatas untuk memenuhi kebutuhan personal terutama untuk komunikasi dan hiburan yang berorientasi pada gaya hidup. dalam tingkat modernitas, sebagian besar generasi muda 71,5% berada pada tingkat modern adaptif dalam arti gaya hidup mengikuti perkembangan zaman dengan sikap kritis yang sedang, namun sikap mereka cukup toleran. hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi media massa ternyata memberikan kontribusi terbesar secara signifikan baik untuk tingkat modernitas maupun pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

Nasionalisme di Indonesia telah mengalami proses transformasi dari global ke lokal, maka kesadaran dan sentimen kebangsaan atau kebanggaan terhadap bangsa yang dimiliki haruslah menyangkut bangsa yang mengakui kita sebagai warganegara yang sah dan legal yaitu bangsa dan NKRI.

U n t u k i t u P e n d i d i k a n Kewarganegaraan (PKn) diarahkan pada pengembangan kualitas warganegara *spiritual development, sense of individual responsibility, and reflective and autonomous personality* (Lee, 1999 dalam Winataputra dan Budimansyah, 2007, hlm. 3) dan PKn yang berorientasi pada

konsep “*contextualized multiple intelligence*” dalam nuasa lokal, nasional, dan global (Cheng, 1999 dalam Winataputra dan Budimansyah, 2007, hlm. 4). Terkait dengan PKn era globalisasi, Setiawan (2009) menyarankan bahwa PKn demokratis sebagai pilihan di era globalisasi, yakni PKn yang mencakup aspek *civic knowledge, civic skills, dan civic disposition*.

PKn perlu memfokuskan pada aspek yang mendorong peserta didik memikirkan dan berefleksi tentang situasi dan kondisi sekitarnya, tentang dirinya, keluarganya, masyarakat dan negara serta bangsanya secara lebih cerdas dan berjangka panjang (Kalidjernih, 2009, hlm. 114-115). Karena generasi muda sebagai generasi penerus harus memiliki tanggung jawab dalam usaha membina dan melestarikan persatuan.

Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan itu tentu bukanlah kebetulan, lahir harapan pendidikan di Indonesia untuk dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan NKRI (Bagian Rasional Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi).

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang harus ditanamkan rasa nasionalisme yang kuat agar mereka tahu betapa pentingnya perjuangan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya (Penelitian Tiyas Santika,

2016)

Hasil penelitian Sundari (2009) menunjukkan nasionalisme peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika faktor pendidik (metoda, materi, evaluasi dan penilaian), lingkungan sekolah, fasilitas sekolah, suasana belajar pendidik, kurikulum, dan demografis siswa serta kemampuan peserta didik ditata dan dibina dengan baik.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan mewakili jenis sekolah menengah di Kota Cimahi, dengan umlah populasi disajikan pada tabel berikut

**Tabel 1**

Populasi Peserta didik Sekolah Menengah  
Kota Cimahi

No	Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Peserta didik
1.	SMA Negeri	6	5.172
2.	SMA Swasta	10	2.403
3.	MAS	7	438
4.	MAN	1	428
5.	SMK Negeri	3	2.770
6.	SMK Swasta	19	9.491
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>20.702</b>

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kota Cimahi (2012)

Berdasarkan Tabel sampel Krejcie dan Morgan (Singarimbun dan Effendi, 2008) maka sampel dalam penelitian ini adalah 421 peserta didik. Rincian sampel dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
Sampel Peserta didik Sekolah Menengah  
Kota Cimahi

No	Sekolah	Populasi	Sampel	Jumlah Peserta didik
1.	SMA Negeri	6	2	94
2.	SMA Swasta	10	2	80
3.	MAN	1	1	41
4.	MAS	7	2	80
5.	SMK Negeri	3	1	46
6.	SMK Swasta	19	2	80
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>10</b>	<b>421</b>

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2012)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan perhitungan statistik dan metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian *Cross-Sectional Survey* artinya peneliti mengobservasi fenomena nasionalisme pada peserta didik di Kota Cimahi pada satu titik waktu tertentu secara bersamaan.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi ditemukan data bahwa kondisi pembelajaran PKn pada sekolah menengah di Kota Cimahi ditemukan beberapa kondisi sebagai berikut ini

- a. Pembelajaran masih berorientasi pada *Transfer of knowledge* dari pendidik kepada peserta didik dan pendekatan ekspositori masih mendominasi yang menyebabkan terabaikannya pendekatan inquiri, pemecahan masalah dan rendahnya keterlibatan

peserta didik dalam pelaksanaan dan perencanaan pembelajaran sehingga muncul budaya belajar menghafal hal ini disebabkan oleh rendahnya motivasi mengajar pendidik karena menyangkut kemampuan aspek kompetensi pendidik yang dimiliki.

- b. Masih dijumpai cara kerja pendidik yang cenderung menganggap bahwa pekerjaannya sebagai pendidik hanya sebagai rutinitas belaka, tidak dilandasi oleh adanya semangat kerja yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- c. Penyelenggaraan proses belajar mengajar, sering tidak tepat waktu, yaitu sering terlambat dalam memulai jam pelajaran serta terlalu awal membubarkan kelas, sehingga dapat memberikan pengaruh atau contoh yang tidak baik terhadap perkembangan perilaku pendisiplinan para peserta didik.
- d. Mata pelajaran PKn dirasa peserta didik melalui pengamatan dan wawancara penulis disimpulkan sementara sangat membosankan dan kurang membantu dalam permulaan studi di perpendidikan tinggi maupun manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Sebagian besar peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut dipergunakan, karena peserta didik memiliki kesulitan untuk memahami

konsep akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan dengan sesuatu yang abstrak dengan metode ceramah. Akibatnya peserta didik mempunyai motivasi belajar yang rendah dan berkorelasi terhadap rendahnya pemahaman.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik, gambaran umum setiap dimensi pada variabel Pembelajaran PKn pada sekolah menengah di Kota Cimahi, dilihat dari capaian nilai rata-rata, standar deviasi, persentase, dan kategorinya, disajikan pada tabel di bawah ini

**Tabel 4**

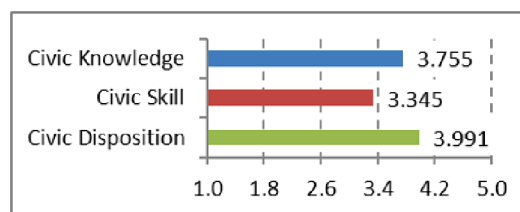
Deskripsi Setiap Dimensi pada Variabel Pembelajaran Pkn

Dimensi	Rata-Rata	Standar Deviasi	Persentase	Kategori
<i>Civic Knowledge</i>	3,755	0,822	75,10	Tinggi
<i>Civic Skill</i>	3,345	1,168	66,90	Sedang
<i>Civic Disposition</i>	3,991	0,853	79,82	Tinggi
<b>Pembelajaran PKN</b>	<b>3,697</b>	<b>0,947</b>	<b>73,94</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Pengolahan Data (2013)

Menunjukkan bahwa secara keseluruhan, variabel pembelajaran PKn mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,697 (73,94%) dengan standar deviasi sebesar 0,947 termasuk pada kategori tinggi. Artinya secara umum pembelajaran PKn pada sekolah menengah di Kota Cimahi dinilai telah terlaksana dengan baik, walaupun memiliki sebaran yang kurang merata. Gambaran umum mengenai pembelajaran PKn pada sekolah menengah di Kota Cimahi sebagaimana tersaji pada tabel tersebut dapat

ditampilkan sebagai berikut.



**Gambar 1**

Capaian Rata-Rata Setiap Dimensi pada Variabel Pembelajaran Pkn

Menunjukkan bahwa dimensi *civic knowledge* dan *civic disposition* termasuk pada kategori tinggi, sementara *civic skill* termasuk pada kategori sedang. Dimensi *civic skill* cenderung memiliki standar deviasi yang paling tinggi dibandingkan dimensi-dimensi lainnya.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik, gambaran umum setiap dimensi pada variabel nasionalisme peserta didik pada sekolah menengah di Kota Cimahi, dilihat dari capaian nilai rata-rata, standar deviasi, persentase, dan kategorinya, dapat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5**

Deskripsi Setiap Dimensi pada Variabel Nasionalisme Peserta Didik

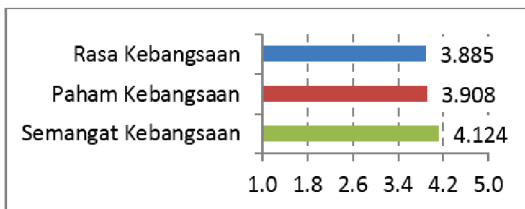
Dimensi	Rata-Rata	Standar Deviasi	Persentase	Kategori
Rasa Kebangsaan Paham	3,885	0,922	77,70	Tinggi
Kebangsaan Semangat	3,908	0,891	78,17	Tinggi
Kebangsaan	4,124	0,845	82,49	Tinggi
Nasionalisme Peserta didik	3,979	0,892	79,57	Tinggi

Sumber: Pengolahan Data (2013)

Menunjukkan bahwa secara keseluruhan, variabel nasionalisme mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,979



(79,57%) dengan standar deviasi sebesar 0,892 yang termasuk pada kategori tinggi. Hal tersebut berarti secara umum nasionalisme peserta didik pada sekolah menengah di Kota Cimahi dinilai telah tinggi, yang menunjukkan tingginya ikatan bagi setiap peserta didik dengan negara dan penguasa resmi negaranya. Gambaran umum mengenai nasionalisme peserta didik pada sekolah menengah di Kota Cimahi sebagaimana tersaji pada tabel tersebut ditampilkan sebagai berikut



Gambar 2

Capaian Rata-Rata Setiap Dimensi pada Variabel Nasionalisme Peserta didik

Menunjukkan bahwa semua dimensi pada variabel ini termasuk pada kategori tinggi. Dimensi yang dinilai relatif paling tinggi dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya dalam variabel ini adalah dimensi Semangat kebangsaan, diikuti oleh dimensi paham kebangsaan, dan dimensi rasa kebangsaan.

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembelajaran Pkn secara langsung berpengaruh positif terhadap nasionalisme peserta didik pada Sekolah Menengah di Kota Cimahi, pengaruh (R-Square) dapat dinyatakan bahwa pembelajaran Pkn berpengaruh **tinggi** terhadap nasionalisme peserta didik.

Beberapa sikap yang dibangun pembelajaran PKn yang memperkuat unsur nasionalisme, yaitu

- a Sifat terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang terjadi;
- b Negara menuntut kesetiaan warga negaranya di mana pun ia berada, karena negara mempunyai sifat memaksa;
- c Hukum mewajibkan setiap warga negara mengarahkan komitmen hidupnya demi terwujudnya kebaikan dan kemajuan negara;
- d Manusia sebagai makhluk Tuhan YME kedudukannya sama tanpa dibedakan;
- e Diskusi politik merupakan alternatif pemecahan masalah isu-isu politik;
- f Memberikan suara dalam pemilu merupakan partisipasi politik aktif;
- g Bergabung dalam organisasi sekolah merupakan bentuk partisipasi politik;
- h Setiap warga negara harus memahami dasar negara dan konstitusi dalam menjaga serta mempertahankan negaranya; dan
- i Partisipasi politik langsung warga masyarakat.

Hal tersebut senada dengan pendapat Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007, hlm. 4) yang menyatakan bahwa *Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching,*

*and learning) in that preparatory process.* Secara umum dapat diterjemahkan bahwa *citizenship or civics education* dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warganegara tersebut.

Tujuan *civic education* atau PKn di Indonesia adalah untuk membentuk warganegara yang baik (*to be good citizen*). Somantri (2001) warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama dan demokratis, Pancasila sejati.

Wahab (2008, hlm. 305) menjelaskan warga negara yang baik adalah warga negara yang mampu memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warganegara, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalahnya sendiri dan juga masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya (*socially sensitive, socially responsible, dan socially intelligence*), memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif agar tercapai kualitas pribadi dan warganegara dan warga masyarakat yang baik (*socio civic behavior dan desirable personal qualities*).

Tujuan PKn bermuara kepada gagasan mengenai warga negara ideal yang tampil sebagai pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar. Untuk itu diperlukan *knowledge* atau pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan, *beliefs: civic virtues*” atau kepercayaan berupa kebijakan warga negara, dan *“skills: civic participation”* yakni keterampilan partisipasi sebagai warga negara.

Untuk mencapai keseluruhan tujuan *civic education* tersebut dikembangkan berbagai pendekatan PKn yang mengarah pada kriteria *“Effective Civic Education”*. Untuk itu, *civic education* dikembangkan sebagai: (1) tujuan utama dari sistem pendidikan dipersyaratkan untuk seluruh tingkatan sekolah; (2) menerapkan pembelajaran yang berkualitas tinggi; (3) menggunakan pendekatan yang bersifat interdisipliner dan metode pembelajaran yang bersifat interaktif; (4) desain kurikulum yang menitikberatkan pada “bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan”; (5) merefleksikan kenyataan di masyarakat; (6) mencakup materi *“historical”* dan *“contemporary”*; (7) memperlakukan kelas sebagai laboratorium demokrasi; (8) kontribusi masyarakat dalam *“civic education”*; dan (9) pelibatan peserta didik dalam masyarakat untuk mendapatkan pengalaman warga negara di dalam masyarakat.

Dilihat dari tujuan, isi, dan proses pembelajaran, kriteria *effective civic education* yang dikembangkan oleh

*Center for Civic Education* tersebut, tampak bahwa *civic education* sebagai suatu bidang kajian ilmiah dan sistem pembelajaran didasarkan pada paradigma pendidikan yang bertolak dari, dikembangkan dengan kerangka, dan bermuara pada perwujudan cita-cita, nilai dan prinsip nasionalisme ke Indonesiaan, dengan menitikberatkan pada pengembangan warganegara yang mampu dan terbiasa mengambil keputusan yang cerdas dan bernalar. Peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Pasal 37, Ayat 1 UU Sisdiknas).

Berdasarkan hasil survai, ada beberapa fakta mengenai keterampilan kewarganegaraan dari para peserta didik yang menunjukkan adanya masalah dalam proses pembelajaran PKn, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 6**

Fakta Keterampilan Kewarganegaraan  
Peserta Didik Kota Cimahi

No	Prosentase	Fakta
1	35,6%	peserta didik mengaku tidak memiliki kecakapan berpikir kritis terhadap isu-isu politik tertentu
	35,6%	sudah berusaha untuk mencoba berpikir kritis terhadap isu-isu politik tertentu
2	39%	peserta didik tidak memahami dengan baik tujuan demokrasi Indonesia
3	31%	peserta didik tidak memahami dengan baik masalah-masalah dunia yang mempengaruhi kehidupan, bangsa Indonesia
4	40,6%	peserta didik tidak mempunyai kemampuan dalam mendiskusikan isu-isu publik di sekolah ataupun kegiatan di masyarakat

5	34,2%	peserta didik tidak siap berpartisipasi dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun bidang politik
6	48,5%	peserta didik tidak mempunyai kemampuan dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa politik di Indonesia pada saat ini

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran PKn saat ini masih disampaikan terlalu teoretis dan kurang melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Keterampilan berpikir kritis peserta didik bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontekstual yaitu dengan mengaitkan materi PKn dengan isu-isu aktual dan kontemporer Indonesia dan dunia.

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang dikaitkan dengan pengetahuan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu pendidik menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga atau masyarakat.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa *contextual teaching and learning* merupakan suatu sistem belajar yang menghubungkan materi pelajaran dengan *isu-isu kontemporer*. Peserta didik tidak hanya terfokus pada *pendidik* dan *buku*

teks, tetapi peserta didik dapat menyerap pelajaran dengan cara mencari makna dalam materi akademis yang mereka pelajari dan mereka mengaitkan materi ajar dengan informasi pada pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki (Jhonson, 2007, hlm. 20).

Selain hal tersebut, hasil survai memperlihatkan unsur-unsur sikap kewarganegaraan yang memperkuat nasionalisme, dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 7**

Unsur-unsur Sikap Kewarganegaraan yang Memperkuat Nasionalisme

No	Sikap Kewarganegaraan
1	Sebagian besar peserta didik aktif dalam salah satu organisasi yang diadakan di sekolah dan di masyarakat
2	Sebagian besar peserta didik sudah berusaha melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara
3	Sebagian besar peserta didik memahami dengan baik makna dan arti penting warna merah putih pada bendera Indonesia
4	Sebagian besar peserta didik memahami dengan baik makna dan arti penting Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia
5	Sebagian besar peserta didik memahami dengan baik makna dan arti penting lagu kebangsaan Indonesia Raya
6	Sebagian besar peserta didik memahami dengan baik sejarah yang melatar belakangi berdirinya monumen nasional di Indonesia
7	Sebagian besar peserta didik berkeyakinan, jiwa raga saya tetap sebagai warga negara Indonesia sekalipun saya bekerja dan menetap di luar negeri

Besarnya unsur keterampilan dan sikap kewarganegaraan yang dimiliki peserta didik ternyata tidak berbanding lurus dengan pengetahuan kewarganegaraan yang dimiliki peserta

didik. Tabel di bawah ini menggambarkan kemampuan pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) peserta didik sekolah menengah di Kota Cimahi.

**Tabel 8**

Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

No	Pertanyaan	Benar	Salah
1	Sistem pemerintahan	27,1%	72,9%
2	Pemerintahan yang dianut oleh konstitusi RIS 1949	31,4%	68,6%
3	Sistem pemerintahan pada masa orde baru	16,6%	83,4%
4	Sistem presidensial	72,9%	27,1%
5	Unsur-unsur dari suatu system	79,1%	20,9%
6	Sistem pemerintahan orde baru	54,2%	45,8%
7	Sistem politik Indonesia	19,0%	81,0%
8	Perilaku sebuah sistem politik	24,5%	75,5%
9	Kultur politik	58,9%	41,1%
10	Demokrasi	28,7%	72,2%
11	Empat prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi	46,3%	53,7%
12	Kediktatoran	46,1%	53,9%
13	Perbedaan diktator dengan demokrasi bukan	85%	15,0%
14	Negara Indonesia adalah negara demokrasi	28,0%	72,0%
15	Hak dan kewajiban warga negara di bidang politik	49,9%	49,4%
16	Konstitusi	49,4%	50,6%
17	Pasal 31 UUD 1945	64,1%	35,9%
18	Hak asasi warga Negara	54,6%	45,4%
19	Sistem politik di Indonesia	17,3%	82,7%
20	Demokrasi	40,6%	59,4%
21	Demokrasi	62,5%	37,5%
22	Fungsi yudikatif	14,3%	85,7%
23	Fungsi eksekutif	28,0%	72,0%
24	Majelis Permusyawaratan Indonesia	24,2%	75,8%
25	ASEAN	40,6%	59,4%
26	Perjanjian internasional	60,6%	39,4%
27	Mahkamah Internasional	15,9%	84,1%
28	Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)	56,8%	43,2%
29	Lembaga Internasional PBB	53,2%	46,8%
30	Kerjasama Internasional	68,4%	31,6%
31	Perjanjian internasional	23,5%	76,5%
32	Hubungan Internasional	7,8%	92,2%
33	Mahkamah Internasional	22,3%	77,7%
34	Hubungan internasional	30,2%	69,8%
35	Politik luar negeri	26,4%	73,6%
36	Tujuan politik luar negeri Indonesia	97,1%	2,9%
37	Badan PBB	24,7%	75,3%
38	Diplomatik dan Konsuler	8,1%	91,9%
39	Diplomat	29,0%	71,1%
40	Lembaga PBB	56,6%	43,3%
41	Pembalasan dendam oleh suatu Negara	54,2%	45,8%
42	Hak dan kewajiban warga negara	14,3%	85,7%
43	Aktivitas warga negara dalam negara demokrasi	11,2%	88,8%
44	Persamaan kedudukan warga negara	36,6%	63,2%
45	Sikap negatif dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia	34,2%	65,8%
46	Musyawah	53,4%	46,6%
47	Partisipasi politik	27,6%	72,4%
48	Partisipasi Non konvensional	27,1%	72,9%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hanya 32% soal yang mampu dijawab dengan benar oleh lebih dari 50% peserta didik, dan 68% soal dijawab salah oleh lebih dari 50% peserta didik.

Kelemahan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan kewarganegaraan mengindikasikan beberapa hal berikut:

- a. Budaya belajar menghafal dan belum munculnya budaya belajar yang disokong kebijakan pendidikan yang lebih menekankan kepada hasil daripada proses pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan peserta didik melupakan pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan setelah selesai ujian karena merasa hapalan tersebut hanya menjadi beban saja.
- b. Banyak peserta didik mampu menyajikan tingkat hapalan yang baik terhadap materi ajar yang diterimanya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak memahaminya. Sebagian besar dari peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut dipergunakan/dimanfaatkan. Peserta didik memiliki kesulitan untuk memahami konsep akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan yaitu dengan menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode ceramah. Padahal mereka sangat butuh untuk dapat memahami konsep-

konsep yang berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya dimana mereka akan hidup dan bekerja.

- c. Pembelajaran PKn di tingkat sekolah selama ini lebih banyak bersifat *transfer of knowledge* dari pendidik kepada peserta didik. Konsekuensinya yaitu pendidik berperan sebagai pusat kegiatan belajar dan peserta didik sebagai peserta pasif yang menerima materi dari pendidik.
- d. Rendahnya motivasi para pelajar dalam mengikuti pembelajaran PKn. Rendahnya motivasi belajar tersebut berkorelasi terhadap rendahnya pemahaman kewarganegaraan di kalangan pelajar.



Gambar 3

Pengaruh Pembelajaran PKn terhadap Nasionalisme

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKn yang terdiri dari sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) akan memperkuat nasionalisme peserta didik, jika pembelajaran PKn disampaikan secara bermutu dan bermakna.

Nasionalisme peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika faktor pendidik (metoda, materi, evaluasi dan penilaian), lingkungan sekolah, fasilitas sekolah, suasana belajar pendidik, kurikulum, dan demografis siswa serta kemampuan peserta didik ditata dan dibina dengan baik. (Hasil penelitian Sundari, 2009).

Penelitian M. Husin Affan dan Hafidh Maksum (2016, hlm. 65-72) agar tidak terpengaruh oleh kebudayaan asing yang bersifat negatif ada beberapa cara mempertahankan kebudayaan Indonesia, yakni 1) Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dan kebudayaan dalam negeri. 2) Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. 3) Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. 4) Selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. 5) Memperkuat dan mempertahankan jatidiri bangsa agar tidak luntur. Dengan begitu masyarakat dapat bertindak bijaksana dalam menentukan sikap agar jatidiri serta kepribadian bangsa tidak luntur karena adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia khususnya.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik, deskripsi setiap dimensi pada variabel pembelajaran PKn peserta didik

adalah *civic knowledge* memperoleh rata-rata 3,755 standar deviasi 0,822 prosentase 75,10 katagori Tinggi. *Civic skill* memperoleh rata-rata 3,345 standar deviasi 1,168 prosentase 66,90 katagori sedang. Dan *civic disposition* memperoleh rata-rata 3,991 dtandar deviasi 0,947 prosentase 73,94 katagori Tinggi. Pembelajaran PKn mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,697 (73,94%) dengan standar deviasi sebesar 0,947 termasuk pada kategori tinggi. Artinya secara umum pembelajaran PKn pada sekolah menengah di Kota Cimahi dinilai telah terlaksana dengan baik, walaupun memiliki sebaran yang kurang merata.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik, deskripsi setiap dimensi pada variabel nasionalisme peserta didik adalah rasa kebangsaan memperoleh rata-rata 3,885 dtandar deviasi 0,922 prosentasi 77,70 katagori Tinggi. Paham Kebangsaan memperoleh rata-rata 3,908 dtandar deviasi 0,891 prosentasi 78,17 katagori Tinggi. Dan Semangat Kebangsaan memperoleh rata-rata 3,908 dtandar deviasi 0,845 prosentasi 82,49 katagori Tinggi. Nasionalisme Peserta Didik di Kota Cimahi memperoleh rata-rata 3,979 (79,57%) standar deviasi 0,892 prosentasi 79,57 katagori Tinggi. Hal tersebut berarti secara umum nasionalisme peserta didik pada sekolah menengah di Kota Cimahi dinilai telah tinggi, yang menunjukkan tingginya ikatan setiap peserta didik dengan negara dan pemerintah.

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembelajaran PKn secara langsung berpengaruh positif terhadap nasionalisme peserta didik pada Sekolah Menengah di Kota Cimahi, pengaruh (R-Square) dapat dinyatakan bahwa pembelajaran PKn berpengaruh tinggi terhadap nasionalisme peserta didik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L. (2009). “Kajian Tentang PKN Berbasis Multikultural Dalam Menumbuhkan Nasionalisme: Studi Kasus Di SMA Santo Aloysius Bandung”. *Tesis Magister pada Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.*
- Anggraeni Kusumawardani & Faturochman (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*. ISSN : 0854 – 7108, Tahun XII, No. 2, 2004.
- Cornelis Lay (2006). Nasionalisme Dan Negara Bangsa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 10, No 2, 2006.
- Dalyono, C. T. (2009). KONTRIBUSI KONSUMSI MEDIA MASSA TERHADAP PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TINGKAT MODERNITAS GENERASI MUDA KOTA (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Agustin, D. S. Y. (2011). Penurunan Rasa Cinta Budaya dan Nasionalisme
- PEDAGOGIA** : Jurnal Ilmu Pendidikan Generasi Muda Akibat Globalisasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 177-185.
- Isjwara, F., (1967). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Dhiwantara.
- Johnson, E. B. (2007). Contextual teaching and learning: Menjadikan kegiatan belajar mengajar menyenangkan dan bermakna. *Bandung: Mizan Learning Center.*
- Jhonson, D. (2007). *Teori Soisologi: Klasik dan Modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kalidjernih, F. K. (2010). *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan: Edisi Kedua.*
- Kohn, H. (1960). *The Idea of Nationalism*, New York: The Mc Millian Coy.
- Kumoro, B. (2006). “[Nasionalisme Indonesia Setelah 61 TahunMerdeka](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/16/opini/2886194.htm)”. [Online]. Tersedia: <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/16/opini/2886194.htm>. [Nasionalisme Indonesia Setelah 61 TahunMerdeka](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/16/opini/2886194.htm). [Diakses pada: 4 Agustus 2018].
- Kartodirdjo, S. (1993) *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia.
- Komalasari, K (2007). Nasionalisme Di Era Otonomi Daerah. *ACTA CIVICUS*, Vol 1, No. 8, 2007.
- Alfaqi, M. Z. (2016). Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Ilmiah*

- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2).
- Affan, M. H. (2016). MEMBANGUN KEMBALI SIKAP NASIONALISME BANGSA INDONESIA DALAM MENANGKAL BUDAYA ASING DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(4).
- Mulyana, A. (2009, October). Pendekatan Historiografi Dalam Memahami Buku Teks Pelajaran Sejarah. In Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Mendekonstruksi Permasalahan Pembelajaran Sejarah Di Sekolah", *Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI pada tanggal (Vol. 19)*.
- Setiawan, D. (2009). Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Bervisi Global dengan Paradigma Humanistik. *ACTA CIVICUS*, Vol 2, No. 2, 2009.
- Singarimbun, M., Effendi, S, (2008). *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Sundari. (2009). "Hubungan Antara Faktor Pendidik, Lingkungan, Dan Peserta didik Dengan Nasionalisme di Kalangan Pelajar SMA (suatu studi tentang peran pembelajaran PKn untuk menumbuhkan pembelajaran PKn untuk menumbuhkan nasionalisme)". *Disertasi. Prodi PIPS, UPI*.
- Tilaar, H.A.R., (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Sartika, T. (2016). PENANAMAN RASA NASIONALISME MELALUI PEMBELAJARAN SEJARAH PADA SISWA KELAS XI IPS DI SMA NEGERI JATILAWANG. *KHAZANAH PENDIDIKAN*, 9(2).
- Wahab. A. A& Sapriya. (2008). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: UPI Press.
- Winataputra, U. S. (2001). Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS) (*Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia*).
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2007). Civic education: Konteks, landasan, bahan ajar, dan kultur kelas. Bandung: *Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI [Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia]*.